

# Analisis muatan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam desain pendidikan karakter pada gerakan penguatan pendidikan karakter

Cucu Sutrisno

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: [cucu\\_sutrisno@uny.ac.id](mailto:cucu_sutrisno@uny.ac.id)

Darmiyati Zuchdi

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: [darmiyatizuchdi@gmail.com](mailto:darmiyatizuchdi@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam desain Pendidikan Karakter pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yang bersifat inferensial berupa proses mendeskripsikan, mengklasifikasi, memaknai dan menyimpulkan muatan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam Desain Pendidikan Karakter pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sumber data yang digunakan untuk analisis konten yakni: 1) Dokumen resmi yang memuat mengenai desain Pendidikan karakter dalam Gerakan PPK sejak tahun 2017-2021 berupa peraturan perundang-undangan serta pedoman implementasi Gerakan PPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK memang menggunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai basis pengembangannya. Namun tidak semua pemikiran Ki Hadjar Dewantara diadaptasi dan ditampilkan secara eksplisit dalam desain pendidikan karakter pada Gerakan PPK.

*This study aims to reveal Ki Hadjar Dewantara's thoughts in the design of Character Education in the Character Education Strengthening Program. This study uses an inferential content analysis method in the form of a process of describing, classifying, interpreting and concluding the content of Ki Hadjar Dewantara's thoughts in Character Education Design in the Character Education Strengthening Program. The data sources used for content analysis are: 1) Official documents containing the design of character education in the Character Education Strengthening Program from 2017-2021 in the form of laws and regulations and guidelines for the implementation of the Character Education Strengthening Program. The results of this research show that the conception of character education in the Character Education Strengthening Program does indeed use Ki Hadjar Dewantara's thoughts as the basis for its development. However, not all of Ki Hadjar Dewantara's thoughts were adapted and displayed explicitly in the design of character education in the Character Education Strengthening Program.*

**Kata Kunci:** pendidikan, pendidikan karakter, Ki Hadjar Dewantara

## PENDAHULUAN

Pendidikan karakter yang bermutu dan berhasil sangat dibutuhkan bagi pembentukan generasi muda Bangsa Indonesia agar menjadi insan yang resilien untuk menghadapi tantangan di abad 21 dan menyongsong Generasi Emas Indonesia di Tahun 2045. Carut-marutnya kondisi sosial-kebudayaan akhir-akhir ini yang berkelindan dengan kemerosotan moralitas akibat kegamangan dalam bersikap ditengah disparitas nilai dan kebudayaan akibat bergulirnya Era Disrupsi dan Era Digital. Perkembangan teknologi digital dengan kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sangat berbahaya karena memungkinkan manusia kehilangan sisi kemanusiaannya termasuk pada aspek karakter (Cathrin & Wikandaru, 2023). Oleh karena itu, pendidikan

karakter sebagai ikhtiar untuk membangun generasi muda yang berjiwa diri dan berkarakter baik harus mampu menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Untuk itu, pendidikan karakter harus dikembangkan dengan presisi sesuai konteks dan kebutuhan pendidikan bagi Bangsa dan Negara Indonesia terkini.

Pemerintah Indonesia melalui kuasa kebijakannya telah mengembangkan pendidikan karakter bagi siswa di sekolah yang pada tahun 2017 dilakukan melalui diadikannya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Gerakan PPK bermula dari adanya kebijakan tentang gerakan pendidikan revolusi mental yang memiliki tujuan untuk membangun karakter (Aulia et al., 2022). Gerakan ini bermula dari Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Melalui gerakan ini, sekolah diarahkan untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana di sekolah. Bisa dikatakan bahwa Gerakan PPK adalah lanjutan serta revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang dimulai pada tahun 2010 (Faturrahman, Farid Setiawan, Windi Dwi Astuti, 2022). Ada optimisme dan skeptisisme dalam memandang pembangunan pendidikan karakter di Indonesia. Tentu kesemuanya itu perlu untuk membangun pendidikan karakter di Indonesia menjadi lebih baik.

Gerakan PPK merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penguatan pendidikan karakter dalam program ini dilakukan gerakan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat serta dilaksanakan melalui pengintegrasian pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler oleh stakeholder sekolah. Gerakan PPK tidak mengubah kurikulum yang sudah ada melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta nonkurikuler di lingkungan sekolah. Gerakan yang difokuskan pada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini menekankan keterlibatan tripusat pendidikan serta mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan ciri khasnya sehingga sekolah menjadi sangat kaya dan unik serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter empat dimensi pengolahan karakter yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara meliputi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olah raga sehingga mampu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter dan kompetensi abad ke-21.

Apabila dilihat sekilas, pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara yakni pendidikan sebagai olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga kemudian pelibatan tripusat pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan nampak menjadi basis dan penekanan utama dalam konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kendati demikian, pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan tidak hanya sebatas itu. Ada banyak aspek pedagogik lainnya yang sangat berharga dan penting bagi pengembangan pendidikan dan/atau pendidikan karakter di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya suatu penelitian yang mengkaji mengenai pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam desain pendidikan karakter pada Gerakan PPK. Pengadapatasian pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa merupakan jawaban atas kebekuan pendidikan di Indonesia yang pengagungan pada konsep pendidikan negara barat yang cenderung eksploitatif dan berorientasi pasar. Selain itu, pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara boleh jadi merupakan jawaban atas pencarian model pendidikan kebangsaan untuk membangun karakter bangsa (Sukri et al., 2016).

Ki Hadjar Dewantara dan pemikirannya di bidang pendidikan memang sangat berharga bagi Bangsa dan Negara Indonesia termasuk bagi pengembangan pendidikan karakter. Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara melalui perguruan Taman Siswa pada 1921 adalah salah satu perwujudan nasionalisme kebudayaan yang keberadaannya memiliki peranan penting dalam mengembangkan mentalitas nasionalis di kalangan kaum muda (Kahin, 2013). Pendirian gerakan Taman Siswa dilakukannya sepulangnya dari pengasingan karena kiprah nasionalisme politik yang ia lakukan sebelumnya. Ki Hadjar Dewantara menyadari bahwa perlawanan terhadap kolonialisme perlu dilakukan melalui pendidikan bukan hanya melalui pergerakan politik saja. Perlawanan

tersebut adalah perlawanan tidak hanya dari luar saja, akan tetapi perlawanan dengan menyebarkan benih hidup merdeka di kalangan rakyat sendiri dengan jalan pengajaran, yang disertai pendidikan nasional (Nurkholida, 2018). Disamping itu, pendidikan bagi kaum pribumi yang di prakarsai pemerintah kolonial Belanda sangat bersifat eksklusif, elitis dan rasis hanya untuk anak golongan atas (ningrat, priyayi), anak pegawai pemerintah kolonial Belanda, atau anak pedagang kaya saja. Metode dan pendekatan pendidikan dan pengajaran yang diterapkan juga mengikuti pola pendidikan Barat masa itu, yaitu *regering, tucht, orde* (perintah, hukuman, dan ketertiban). Ki Hadjar Dewantara menyadari bahwa pendidikan semacam itu tidak akan bisa membentuk seseorang hingga memiliki “kepribadian/identitas” namun hanyalah proses politik, kultural dan historis pemerintah Kolonial Belanda untuk melanggengkan hegemoninya, meneruskan marginalitas dan subordinasi pribumi Indonesia (Makasau, 2020).

Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara memuat aspek-aspek pendidikan karakter didalamnya. Menurutnya, pendidikan adalah usaha untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak (Dewantara, 2011). Pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak dalam artian menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Atau dalam perkataan menjadi insan yang merdeka lahir batin. Tuntunan melalui pendidikan berfungsi menuntun anak-anak agar memiliki kecerdasan budi pekerti dan/atau menghindarkan anak-anak dari segala macam pengaruh jahat (Dewantara, 2011).

Terdapat penekanan pada pembentukan karakter atau budi pekerti dalam pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berkeadaban (*zelfbeheersching*) atau memiliki kecerdasan budi pekerti dalam artian mampu menguasai dirinya atau mampu berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang mampu memerintah atau menguasai diri sendiri (mandiri). Penguasaan diri terkait dengan karakter atau yang dalam bahasa Indonesia disebut budi pekerti atau watak yang berarti bulatnya jiwa manusia yang berarti bahwa jiwanya telah berasas pada hukum kebatinan. Orang yang cerdas budi pekertinya senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan, serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti (Dewantara, 2011).

Pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai kewajiban dan kekuasaan pendidikan untuk membentuk budi pekerti terkait dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai «dasar jiwa» pada manusia. Dasar jiwa adalah keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri sebelum ada pengaruh dari luar (Dewantara, 2011). Terkait dengan dasar jiwa tersebut, Ki Hadjar Dewantara lebih cenderung pada teori konvergensi (Marzuki & Khanifah, 2016). Menurut teori konvergensi, seorang anak itu terlahir seperti kertas yang sudah terisi penuh, akan tetapi tulisannya suram. Oleh karena itu, pendidikan berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan tulisan suram tersebut namun yang baik-baik nya saja agar nanti nampak menjadi budi pekerti yang baik sementara tulisan yang bermuatan jahat hendaknya dibiarkan saja agar tidak menjadi tebal dan bahkan dapat menjadi semakin suram (Dewantara, 2011). Selanjutnya, menurut teori konvergensi, watak manusia itu terbagi menjadi dua yakni bagian yang intelligible dan bagian yang biologis. Pertama, bagian yang *intelligible* merupakan kecerdasan angan-angan atau pikiran yang dapat berubah karena pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, bagian biologis yakni bagian jiwa mengenai perasaan (malu, takut, ecewa dll.) yang akan tetap ada di dalam jiwa manusia dan tidak bisa diubah. Namun, tabiat-tabiat “biologis” dapat dikendalikan dengan “menguasai diri” dan oleh itu Ki Hadjar Dewantara berpandangan bahwa “menguasai diri” atau “*zelfbeheersching*” adalah tujuan pendidikan dan maksudnya keadaban (Marzuki & Khanifah, 2016). Berkenaan dengan jiwa, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa didalamnya terdapat Trisakti Jiwa (tiga kekuatan jiwa) yakni fikiran, perasaan dan kemauan (*cipta, rasa dan karsa*). Cipta adalah daya berpikir untuk mencari kebenaran. Karas adalah gerak-gerak hati atau hal-hal yang terkait dengan perasaan. Sedangkan karsa adalah kehendak atau kemauan yang merupakan perwujudan hawa nafsu manusia setelah dipertimbangkan oleh akan dan perasaan (Dewantara, 2011: 451-452). Ketiga hal tersebut adalah syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila atau makhluk yang berbudi dan beradab (Dewantara, 2011). Oleh karena itu, pendidikan haruslah merupakan harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik) (Zulfiati, 2019).

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara berikutnya adalah penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan melalui pendidikan nasional. Maksudnya adalah bahwa pendidikan dan pengajaran untuk rakyat haruslah diprakarsai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri dan kemudian oleh negara Indonesia setelah ia berdiri. Dasar atau asas pendidikan nasional (Taman Siswa) adalah *Panca Dharma* yakni prinsip kodrat alam (*basic of nature*), prinsip kemerdekaan (*basic of independence*), prinsip kebudayaan (*basic of culture*), prinsip kebangsaan (*Basic of nation*), prinsip kemanusiaan (*basic of humanity*) (Setyorini & Asiah, 2022; Wijayanti, 2018). Muatan pendidikannya harus selaras dengan landasan hidup bangsa dan kebudayaan bangsa Indonesia yang dalam perkataan Ki Kajar Dewantara harus selaras dengan penghidupan bangsa (*maatschappelijk*) dan kehidupan bangsa (*cultureel*) (Dewantara, 2011). Ini berarti bahwa sebagai sebuah proses kebudayaan, pendidikan karakter haruslah menjadikan kebudayaan bangsa sebagai dasar atau landasan Pendidikan (Hikmasari, 2021). Oleh karena itu, Ki Hadjar Dewantara menkankan bahwa:

*“Pendidikan nasional menurut paham Taman Siswa ialah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya (cultureel-nationaal) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (maatschappelijk) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia”. (Dewantara, 2011).*

Sehubungan dengan hal tersebut, asas dalam pendidikan karakter haruslah menggunakan konsep *Tri-Kon* yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Dasar kontinuitas berarti pendidikan sebagai usaha pengembangan kebudayaan harus menempatkan pengembangan kebudayaan sebagai kelanjutan dari kebudayaan sebelumnya (garis hidup asalnya) menuju pada kemajuan. Artinya, pendidikan adalah pengembangan kebudayaan bersifat *continue*, tetap bersambung terus menerus secara berkesinambungan. Dasar konsentrisitas berarti dalam upaya mengembangkan kebudayaan asli Indonesia, haruslah bersikap terbuka, akan tetapi tetap kritis dalam bertindak dan selektif dalam memilah kebudayaan asing sehingga hanya unsur-unsur yang dapat memperkaya dan mempertinggi mutu kebudayaan saja yang dapat diambil dan diterima, setelah dicerna dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Dasar konvergensi yakni upaya mengembangkan karakter atau kebudayaan bangsa, harus pula bersamaan dengan mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan umat sedunia (konvergen), tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa masing-masing (Akbar Albany, 2021; Ghifari et al., 2015).

Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dipaparkan sebelumnya menerapkan sistem pondok dan asrama atau *paguron* yang mensinergikan tripusat pendidikan yakni keluarga, sekolah (perguruan) dan masyarakat (alam pemuda) karena asrama tersebut sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat (Acetylena, 2018; Dewantara, 2011; Suparlan, 2016). Pada sekolah dengan sistem asrama semua tinggal bersama-sama satu kompleks dengan para guru, pamong, dan pengurus sekolah, membentuk suatu masyarakat kekeluargaan dalam kebersamaan yang tinggi (Suparlan, 2016). Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang terpenting karena keberfungsian menekankan pada pendidikan budi pekerti anak. Sekolah (perguruan) adalah pusat pendidikan yang memberikan kecerdasan fikiran (perkembangan intelektual) beserta pemberian ilmu pengetahuan (*balai-wiyata*) (Dewantara, 2011).

Sistem pengajarannya menggunakan sistem *among* yakni Guru atau pendidik pada sistem *among* berperan; *ing ngarso sung tuladha* (pemberi teladan), *ing madya mangun karsa* (membrosamai dan memotivasi), *tutwuri handayani* (membimbing dan mengarahkan) (Acetylena, 2018; Marzuki & Khanifah, 2016; Suparlan, 2016). Sistem *among* memiliki dua dasar yakni kemerdekaan dan kodrat alam. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin agar dapat hidup merdeka sedangkan kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan (Setyorini & Asiah, 2022). *Mengemong* (anak) berarti memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong/guru akan bertindak, kalau perlu dengan paksaan apabila keinginan anak membahayakan keselamatannya (Wardani, 2010). *Ing ngarso sung tuladha* berarti seorang pamong (pendidik) hendaknya mampu menjadi contoh baik atau teladan (*centre figure*) bagi peserta didik. *Ing sung tuladha* berarti pamong (pendidik) membimbing dan mendorong tumbuhnya minat, hasrat dan kemauan peserta didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Kemudian, *Tutwuri handayani* yakni *tutwiri* berarti mengikuti dari belakang dengan penuh

perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat *authoritative*, *possessive*, *protective* dan *permissive* yang sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan peserta didik atas inisiatifnya sendiri dan pengalamannya sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Melalui tutwuri handayani, pamong (pendidik) memberi kemerdekaan bergerak kepada peserta didiknya, dengan tetap berperan mencegah penyalahgunaan kebebasan yang diberikan yang akan membahayakan diri peserta didik (Niyarci, 2022; Tarigan et al., 2022; Wardani, 2010).

Dalam pelaksanaan pendidikannya Ki Hadjar Dewantara menyarankan digunakannya peralatan pendidikan atau cara mendidik berikut ini yaitu; 1) memberi contoh (*voorbeeld*); 2) pembiasaan (*pakulinan*, *gewoontevorming*); 3) pengajaran (*leering*, *wulang-wuruk*); 4) perintah, paksaan, dan hukuman (*regeering en tucht*); 5) laku (*zelfbeheersching*, *zelfdiscipline*); dan 6) pengalaman lahir dan batin (*nglakoni*, *ngroso*, *beleving*). Kiranya hal ini terkait dengan metode anak belajar yang menurut Ki Hadjar Dewantara, untuk usia SD keatas harus menerapkan Tri Nga, yaitu *ngerti* (kognitif) dengan akal, *ngrasa* (afektif), yaitu merespon, menghargai, menjunjung nilai-nilai dan *nglakoni* (psikomotorik) yaitu bertindak secara terpimpin (Dewantara, 2011; Suparlan, 2016; Tarigan et al., 2022). Kemudian, pelaksanaan pendidikan karakter juga harus disesuaikan dengan tahapan pendidikan karakter yang sejalan dengan tingkatan jiwa anak sesuai umurnya yakni tingkatan *syariat*, *hakikat*, *tarikah*, dan *makrifat*. *Pertama*, untuk anak-anak kecil (TK dan SD) berada pada tingkatan *syariat* dengan pendidikan karakter berupa pembiasaan dan keteladanan. Kedua, untuk anak remaja (akal balig) berada pada tingkatan *hakikat* berupa pemberian pengertian agar menyadari kebaikan. Ketiga, untuk orang dewasa awal berada pada tingkatan *tarikah* yakni melatih diri dalam melaksanakan kebaikan bagaimanapun sulit dan beratnya. Keempat, untuk orang yang sudah dewasa berada pada tingkatan *makrifat* yang berarti sudah memahami betul mengenai kebaikan dan mampu berfikir, bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan. (Acetylena, 2018; Dewantara, 2011). Itulah konsepsi Ki Hadjar Dewantara mengenai proses belajar yang harus dituju dalam pendidikan karakter.

## METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten yang bersifat inferensial (*inferential content analysis*). Analisis konten dalam penelitian ini berarti teknik penelitian untuk membuat suatu inferensi yang valid dan dapat di teliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. Peneliti ini menggunakan suatu konstruk analitis sebagai dasar inferensi (Zuchdi & Afifah, 2019). Oleh karena itu, konstruk analitis dalam penelitian ini yaitu kesesuaian desain pendidikan karakter dalam Gerakan PPK dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan Karakter. Sumber data penelitian meliputi infografis, modul dan buku saku untuk panduan implementasi Gerakan PPK serta peraturan perundang-undangan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/> yakni (1) Buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan karakter; (2) Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter; (3) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas; (4) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya Sekolah; (5) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Masyarakat; (6) Buku Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan dalam PPK oleh Kepala Sekolah; (7) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; dan (8) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Prosedur analisis konten pada penelitian ini meliputi (1) pengadaan data; (2) pengurangan (reduksi) data; (3) Inferensi; (4) Analisis (Zuchdi & Afifah, 2019). *Pertama*, pengadaan data dalam penelitian ini berupa penentuan unit, penentuan sampel, dan pencatatan data mengenai kesesuaian desain pendidikan karakter dalam Gerakan PPK dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan Karakter. *Kedua*, pengurangan (reduksi) data melalui penghilangan data yang tidak relevan. *Ketiga*, inferensi dengan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengurangi makna simboliknya dan dengan menggunakan konstruk analisis yakni desain pendidikan karakter dalam Gerakan PPK memiliki kesesuaian dengan Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan Karakter. *Keempat*, analisis kualitatif untuk menemukan aspek-aspek kesesuaian desain pendidikan karakter dalam Gerakan PPK dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan Karakter.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Adaptasi Pemikiran Pendidikan Ki Kajar Dewantara dalam Konsepsi Pendidikan Karakter di Sekolah pada Gerakan PPK

Kehadiran gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sangat bernuansa politis. Pencanangan Gerakan PPK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tindak lanjut atas adanya arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter dalam rangka merealisasikan Nawacita (Nwacita 8) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) setelah ia mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presidennya pada periode 2014-2019. Oleh karena itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal secara eksplisit disebutkan bahwa:

*“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)” (Kemendikbud, 2018).*

Revolusi Mental, selain sebagai jargon kampanye Jokowi-JK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang kemudian menjadi basis bagi penyusunan program pemerintah melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2016 Tentang Gerakan nasional Revolusi Mental dan peraturan pendukung lainnya. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional revolusi mental disebutkan bahwa ide dasar dari Revolusi Mental adalah membangun jiwa bangsa, yaitu jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Semangat Revolusi Mental adalah melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu salah satu poin revolusi mental memang sudah seharusnya memasukan poin ‘melakukan revolusi karakter bangsa’ didalamnya.

Gerakan PPK melalui penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai salah satu jalan mewujudkan ide dasar revolusi mental berupa pembangunan jiwa bangsa yang merdeka, bebas dan berkemajuan sebagai mana dijelaskan sebelumnya agaknya beririsan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, melalui pendidikan sebagai usaha kebudayaanlah upaya membangun jiwa manusia agar memiliki keberadaban (berbudipekerti luhur), dan merdeka lahir-batin serta berkemajuan dapat dilakukan. Karena melalui pendidikanlah diberikan tuntunan (*cipta, rasa dan karsa*) pada manusia. Oleh karena itu pendidikan harus berlandaskan pada asas Panca Dharma yakni prinsip kodrat alam (*basic of nature*), prinsip kemerdekaan (*basic of independence*), prinsip kebudayaan (*basic of culture*), prinsip kebangsaan (*Basic of nation*), prinsip kemanusiaan (*basic of humanity*). Ide dasar GNRM sebagai alasan keberadaan Gerakan PPK memang tidak sepenuhnya mengadopsi pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara, hanya beririsan saja.

Penggunaan pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara tersebut bukanlah hal baru sebab pada Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 juga telah ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. Olah hati terkait perasaan sikap dan keyakinan/keimanan. Kemudian olah pikir terkait proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, olah raga terkait proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Terakhir, olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan (Marzuki, 2012).

Gerakan penguatan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan yang beririsan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Tujuan pertama, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna

dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pada dasarnya pendidikan adalah tuntunan bagi anak untuk dapat memiliki keberadaban (budi pekerti) (Dewantara, 2011). Tujuan kedua, membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21 sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan diperlukan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, tentu hal ini dalam artian pendidikan pendidikan harus mampu menuntun anak-anak untuk dapat menghadapi zaman yang terus berubah (Dewantara, 2011). Tujuan ketiga, mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan haruslah merupakan harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olah raga (kinestetik) karena pendidikan adalah tuntunan bagi jiwa manusia yang berkebudayaan yang memiliki dimensi *cipta*, *rasa* dan *karsa* (Dewantara, 2011).

Tujuan keempat, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa setiap guru (*pamong*) dan stakeholder sekolah harus mampu memberikan pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah karena pendidikan karakter bukanlah hanya melalui satu mata pelajaran tertentu saja (Dewantara, 2011). Tujuan kelima, membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan harus dilaksanakan oleh Tripusat pendidikan yakni keluarga, sekolah (alam perguruan) dan masyarakat (alam pergerakan pemuda) secara bersinergi. Keluarga sebagai pusat pendidikan budi pekerti, sekolah (balai wiyata) sebagai pusat pemberian pengetahuan dan intelektualitas serta alam pergerakan pemuda sebagai wadah merdekanya kaum pemuda (penyaluran minat dan bakat) untuk pembentukan jati diri dan wataknya (Dewantara, 2011). Tujuan keenam, melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan haruslah berlandaskan pada asas Trikon yakni kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Dasar kontinuitas berarti pendidikan sebagai usaha pengembangan kebudayaan harus menempatkan pengembangan kebudayaan sebagai kelanjutan dari kebudayaan sebelumnya (garis hidup asalnya) menuju pada kemajuan. Dasar konsentrisitas berarti bahwa pendidikan adalah upaya mengembangkan kebudayaan asli Indonesia dengan sikap terbuka namun selektif sesuai dengan kepribadian bangsa. Dasar konvergensi berarti bahwa upaya mengembangkan karakter atau kebudayaan bangsa, harus pula bersamaan dengan mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kebudayaan kesatuan umat sedunia (konvergen), tanpa mengorbankan kepribadian atau identitas bangsa Indonesia (Akbar Albany, 2021; Ghifari et al., 2015).

Gerakan PPK diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, sekolah diarahkan untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana. Pada pelaksanaannya, Kemdikbud menetapkan sekolah-sekolah rintisan pelaksana Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai upaya implementasi mandiri dan bertahap Gerakan PPK. Direncanakan pada tahun 2020, setiap sekolah di Indonesia dapat melaksanakan penguatan pendidikan karakter secara mandiri. Upaya pemerintah dalam memprakarsai adanya penguatan pendidikan karakter di sekolah secara nasional sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara bahwa bangsa Indonesia melalui pemerintahan negara harus menyelenggarakan suatu pendidikan nasional bagi rakyatnya (Dewantara, 2011). Namun demikian, hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa suatu pendidikan nasional yang ideal adalah melalui sekolah dengan sistem pondok dan asrama atau *paguron* yang mensinergikan tripusat pendidikan yakni keluarga, sekolah (perguruan) dan masyarakat (alam pemuda) karena asrama tersebut sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat. Sebab sistem sekolah umum menurut Ki Hadjar Dewantara telah menjauhkan anak-anak dari alam keluarga dan gerakan pemuda (tidak tercipta sinergi Tripusat) (Dewantara, 2011). Kendati keberadaan Gerakan PPK bersamaan dengan penerapan kebijakan *Full*

*Day School* yang mengharuskan peserta didik lebih lama berada di sekolah namun hal itu tentu berbeda dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Pada desain pendidikan karakter dalam Gerakan PPK, terdapat 18 nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama atau prioritas dalam Gerakan PPK yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi. Nilai-nilai karakter itu adalah aktualisasi Pancasila, 3 Pilar Gerakan Revolusi Mental, nilai-nilai kearifan lokal dan tantangan masa depan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara bahwa Pendidikan budi pekerti adalah pemberian keinsyafan kepada anak mengenai kebaikan agar peserta didik dapat melakukan berbagai perbuatan baik secara disengaja (berkarakter) (Dewantara, 2011). Terkait dengan apa itu kebaikan dan dari mana sumber-sumber kebaikan itu berasal, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa hal tersebut ada pada nilai etik (moral), adat istiadat dan adab atau kesusilaan (Dewantara, 2011). Muatan pendidikan harus disesuaikan dengan jatidiri diri dan kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana dalam asas *Trikon* yakni kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi (Akbar Albany, 2021; Ghifari et al., 2015).

Adanya 18 nilai karakter dalam pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2010, Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud RI bahkan telah mengembangkan nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 tahun 2006) dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Depdiknas RI (Pusat Kurikulum Kemdiknas, 2009) yang berjumlah 24 nilai. Nilai-nilai utama yang harus dicapai dalam pembelajaran di sekolah (institusi pendidikan) di antaranya adalah (1) Religius, (2) Kejujuran, (3) Kecerdasan, (4) Ketangguhan, (5) Kedemokratisan, (6) Kepedulian, (7) Kemandirian, (8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, (9) Keberanian mengambil risiko, (10) Berorientasi pada tindakan, (11) Berjiwa kepemimpinan, (12) Kerja keras, (13) Tanggung jawab, (14) Gaya hidup sehat, (15) Kedisiplinan, (16) Percaya diri, (17) Keingintahuan, (18) Cinta ilmu, (19) Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, (20) Kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial, (21) Menghargai karya dan prestasi orang lain, (22) Kesantunan, (23) Nasionalisme, (24) Menghargai keberagaman (Marzuki, 2012; Muchtar & Suryani, 2019).

Sesuai konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK, pelaksanaan pendidikan karakter tidak mengubah kurikulum yang sudah ada melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui pengintegrasian pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk jenjang SMP dan intrakurikuler untuk jenjang TK. Ini berarti, Basis gerakan pendidikan karakternya adalah dengan mengoptimalkan kemitraan tripusat pendidikan yakni sekolah, keluarga dan masyarakat. Optimalisasi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat. Pada pendekatan berbasis kelas, pendidikan karakter dilaksanakan melalui hal-hal berikut ini (1) pengintegrasikan pada seluruh kurikulum yang berarti diintegrasikan dalam proses pembelajaran setiap mata pelajaran, (2) melalui manajemen kelas yakni mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai utama karakter, (3) melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran dalam artipemilihan dan penggunaan metode pembelajaran harus mampu mendukung pemberian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pada abad XXI, (4) pendidikan karakter melalui mata pelajaran khusus dalam arti sekolah bisa pula mengajarkan nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran khusus yang berfokus pada tema nilai-nilai tertentu, (5) melalui gerakan literasi dalam arti melaksanakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter seseorang menjadi tangguh, kuat, dan baik, (6) melalui layanan bimbingan dan konseling dalam arti pendidikan karakter bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling (Hendarman, 2017: 27-33). Kemudian, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah berarti kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung pendidikan karakter dengan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah (Hendarman, 2017). Ada 8 cara pendidikan karakter berbasis budaya



sekolah yang disebutkan yakni (1) melakukan pembiasaan, (2) memberikan keteladanan antarwarga sekolah, (3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan, (4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah, (5) mengembangkan penjenamaan sekolah, (6) mengembangkan kegiatan literasi, (7) mengembangkan minat, bakat dan potensi melalui ekstrakurikuler, (8) melakukan pendampingan (Suhadisiwi, 2018). Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan karakter harus dilangsungkan di sekolah pada setiap mata pelajaran dan kegiatan di sekolah oleh Guru (pamong) dan warga sekolah lainnya (Dewantara, 2011).

Pendidikan karakter berbasis masyarakat dilakukan dengan (1) memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, (2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; (3) mensinergikan implementasi pendidikan karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi (Kemendikbud, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus ada sinergi Tripusat pendidikan yakni keluarga, sekolah dan alam pergerakan pemuda (Dewantara, 2011). Namun, dalam konsepsi Gerakan PPK, sekolah yang dimaksud bukanlah sekolah dengan sistem pondok dan asrama melainkan sekolah umum. Hal inilah yang paling membedakan konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Kemitraan Tripusat pendidikan dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara agaknya sejalan dengan apa yang disebut oleh beberapa ahli sebagai konsepsi kemitraan holistik. Pendidikan persekolahan yang mengesampingkan peranan dan keterlibatan orang tua dan/atau keluarga dan masyarakat bukanlah pendidikan yang ideal. Terlebih bagi pendidikan sebagai ikhtiar untuk membentuk budi pekerti, watak, atau karakter anak yang memang sangat perlu pelibatan orang tua dan/atau keluarga di dalamnya. Penguatan pendidikan karakter di sekolah perlu dilangsungkan secara kolaboratif terutama dengan orang tua dan/atau keluarga siswa agar pendidikan karakter dapat berlangsung secara efektif. Model kemitraan holistik (*total home-school partnership*) mengandung pengertian bahwa keluarga dan masyarakat terlibat dalam berbagai aspek pendidikan persekolahan dan mendukung sekolah melalui berbagai cara. Kemudian, kemitraan juga berarti bahwa sekolah memberdayakan keluarga untuk memperkuat berbagai aspek dalam pendidikan keluarga dan membantu orang tua dan/atau keluarga untuk berpartisipasi dalam pendidikan persekolahan (Cheng, 2005).

## SIMPULAN

Keberadaan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengharuskan sekolah untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana di sekolah adalah bagian dari pembangunan pendidikan karakter di Indonesia. Kendati demikian, kemunculannya bernuansa politis sebab Gerakan PPK adalah salah satu bentuk aktualisasi dari Nawacita (Nawacita 8) dan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak mereka mencalonkan diri dalam Pemilu 2014.

Konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK memang menggunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai basis pengembangannya. Namun tidak semua pemikiran Ki Hadjar Dewantara diadaptasi untuk menyusun konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara seperti harmonisasi pendidikan melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga serta pelibatan Tripusat pendidikan memang secara eksplisit diadaptasikan dalam konsepsi pendidikan karakter pada Gerakan PPK. Namun pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang lainnya tidak ditamikan secara eksplisit dan bahkan tidak digunakan seperti sistem sekolah pondok dan asrama yang sangat di sarankan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pemikiran lainnya seperti *Tri nga* (ngerti, ngrasa dan nglakoni) serta sistem among *ing ngarso sung tuladha* (pemberi teladan), *ing madya mangun karsa* (membersamai dan memotivasi), *tutwuri handayani* (membimbing dan mengarahkan) dan pemikiran-pemikiran lainnya tidak tampil secara eksplisit dalam konsepsi pendidikan karakter pada Gerakan PPK.

Selain itu, konsepsinya tidak jauh berbeda dengan konsepsi pendidikan karakter yang telah dikembangkan Kementerian Pendidikan nasional pada tahun 2010. Pada tahun 2024, akan ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ini berarti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia akan berganti. Sulit kiranya memastikan kebijakan pendidikan karakter dalam Gerakan PPK ini akan berlanjut pada periode pemerintahan berikutnya. Apalagi, Kurikulum 2013 sebagai desain kurikulum yang menjadi pertimbangan Gerakan PPK telah berganti menjadi Kurikulum Merdeka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Acetylena, S. (2018). *Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara*. Madani.
- Akbar Albany, D. (2021). Perwujudan Pendidikan Karakter pada Era Kontemporer Berdasarkan Perspektif Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i2.3393>
- Aulia, S. S., Arif, B., Amalia, R., Hidayati, N., & Yudha, R. A. (2022). Implementasi gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai wahana pendidikan nilai. *Pendidikan Karakter*, 2, 234–243. <https://doi.org/10.21831/jpka.v13i2.53207>
- Cathrin, S., & Wikandaru, R. (2023). The future of character education in the era of artificial intelligence. *Humanika*, 23(1), 91–100. <https://doi.org/10.21831/hum.v23i1.59741>
- Cheng, Y. C. (2005). Reengineering Total Home-school Partnership. In *New Paradigm for Re-Engineering Education Education in the Asia-Pacific Region : Issues , Concerns and Prospects* (pp. 457–474). Springer.
- Dewantara, K. H. (2011). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan* (4th ed.). Yayasan Persatuan Taman Siswa.
- Faturrahman, Farid Setiawan, Windi Dwi Astuti, & K. K. (2022). Analisis kebijakan program penguatan pendidikan karakter. *TSAQOFAH*, 2(4), 466–474.
- Ghifari, A., Sauri, S., & Alfarisi, Z. (2015). Pemikiran Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Logika Dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan TAJDID*, XIV(2), 387–396.
- Hendarman. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekertariat Jendral kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hikmasari, D. N. (2021). Konsep Pendidikan Karakter Menurut Thomas Lickona Dan Ki Hajar Dewantara. *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education*, 6(1), 19–31.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* (T. K. Bambu (ed.); I). Komunitas Bambu.
- Kemendikbud. (2018). Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. *Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal*, 8–12.
- Makasau, R. (2020). Pedagogi Ki Hajar Dewantara Untuk Pengembangan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Jurnal Jumpa*, 8(1), 107–124.
- Marzuki. (2012). Intergating character education in the teaching and learning at school. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 33–44.
- Marzuki, M., & Khanifah, S. (2016). Pendidikan ideal perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 172–181. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12740>
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.142>
- Niyarci, N. (2022). Perkembangan Pendidikan Abad 21 Berdasarkan Teori Ki Hajar Dewantara. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.336>
- Nurkholida, E. (2018). FILSAFAT PENDIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF JAWA (Studi Pemikiran

Ki Hajar Dewantara). *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 393. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v16i2.1374>

Setyorini, A., & Asiah, S. (2022). Konsep Pendidikan Karakter Menurut Ki Hajar Dewantara. *Turats*, 14(2), 71–99. <https://doi.org/10.33558/turats.v14i2.4466>

Suhadisiwi, I. (2018). *Panduan Praktis Implementasi PPK Berbasis Budaya Sekolah*.

Sukri, S., Handayani, T., & Tinus, A. (2016). Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Jurnal Civic Hukum*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.22219/jch.v1i1.10460>

Suparlan, H. (2016). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jf.12614>

Tarigan, M., Alvindi, A., Wiranda, A., Hamdany, S., & Pardamean, P. (2022). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 149–159. <https://doi.org/10.33487/mgr.v3i1.3922>

Wardani, K. (2010). *Peran Guru Dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. November, 8–10.

Wijayanti, D. (2018). Character Education Designed By Ki Hadjar Dewantara. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 10(2), 85. <https://doi.org/10.17509/eh.v10i2.10865>

Zuchdi, D., & Afifah, W. (2019). *Analisis konten etnografi & grounded theory dan hermeneutika dalam penelitian* (Bumi Aksara (ed.); I).

Zulfiati, H. M. (2019). Pendidikan Karakter Perspektif Ki Hadjar Dewantara Dalam Membentuk Generasi Unggul Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional PGSD*, ISBN 978-6(April), 1–6.

